

BAB 10

Berbagai Opsi Kebijakan dalam Pendidikan Nilai

William K. Cummings

Pendidikan nilai mungkin merupakan kepedulian masyarakat yang paling mendasar, namun pada umumnya tugas-tugas yang termasuk ke dalam pendidikan nilai dilaksanakan di dalam dan oleh berbagai institusi, seperti keluarga, masyarakat dan gereja. Pada umumnya institusi-institusi tersebut tidak dipengaruhi oleh kebijakan publik. Oleh karenanya, pilihan apa yang tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan publik agar dapat mempengaruhi pendidikan nilai?

Contoh-contoh kasus yang ditampilkan pada bab sebelumnya, mengungkap beragam hal menyangkut pendidikan nilai serta pelaksanaannya di masing-masing negara. Perbedaan-perbedaan ini mengindikasikan kompleksitas dari bidang garapan pendidikan nilai, serta berbagai risiko yang muncul ketika kita mencoba menerapkan pelaksanaan pendidikan nilai yang di praktekkan di satu negara ke negara lainnya. Namun secara bersamaan, perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan munculnya pemikiran-pemikiran mengenai berbagai pendekatan yang mungkin dapat diterapkan di dalam pendidikan nilai. Pada bab ini, dengan mengambil contoh dari berbagai contoh kasus, saya ingin mencoba merumuskan berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan publik guna memajukan pendidikan nilai.

Perumusan dan Analisis Kebijakan

Sebagai pengantar dalam diskusi mengenai berbagai opsi kebijakan, maka pembahasan mengenai beberapa observasi mengenai sifat dasar dari perumusan kebijakan dan hubungannya dengan analisis kebijakan akan sangat membantu. Kebijakan, setidaknya dalam diskusi berikut ini, berhubungan dengan berbagai aksi yang dilakukan oleh pemerintah. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan aksi-aksi tersebut diberikan oleh pendukungnya yang berasal dari masyarakat luas, dan pada umumnya aksi-aksi ini dilakukan demi kepentingan para pendukungnya. Dengan menguntungkan para pendukungnya,

maka pemerintah dapat memperkuat kekuasaannya. Di dalam masyarakat yang bersifat demokratis, jumlah dukungan cenderung meluas, hampir meliputi seluruh komunitas masyarakat. Pada pemerintahan yang bersifat otoriter, jumlah dukungan pada umumnya lebih sedikit; pada kasus yang ekstrem, pemerintah itu sendiri merupakan pendukung / konstituensi yang utama.

Proses sebenarnya dari perumusan kebijakan sangatlah kompleks, karena melibatkan interaksi dari berbagai faktor sehingga mengikutsertakan berbagai pihak. Pada bab ini, saya menggambarkan para pemimpin politik sebagai penengah dari proses tersebut. Para pemimpin ini bertindak dengan memperimbangkan berbagai hal: asal-usul / warisan kebudayaan mereka, kompleksitas sistem sosio-politik dan ekonomi mereka, serta berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Dengan mempertaruhkan simplifikasi yang berlebih, enam pertanyaan penting dapat diajukan kepada para pembuat kebijakan dalam merumuskan sebuah kebijakan dalam pendidikan nilai, seperti yang diilustrasikan pada gambar 10.1. Jawaban yang diberikan oleh para pembuat kebijakan mengenai pertanyaan Mengapa dan Apa (yang berada di bagian atas dari diagram) cenderung akan mempengaruhi jawaban yang mereka berikan terhadap pertanyaan-pertanyaan lainnya yang terdapat di dalam diagram.

Para pemimpin politik tidak selalu mampu mengartikulasikan berbagai perhitungan yang mereka gunakan dalam mengidentifikasi serta dalam mendukung kebijakan-kebijakan tertentu. Mereka melakukannya berdasarkan pengalaman, firasat, prasangka serta berbagai saran dari penasihat mereka. Menurut pendapat saya, bagaimanapun juga jawaban dari pertanyaan ini diambil oleh para pemimpin politik dengan mempertimbangkan dua hal utama, yakni: apa dampak politik yang akan ditimbulkan oleh kebijakan yang mereka ambil, serta keuntungan apa yang akan di dapat dengan pengorbanan ekonomi yang kecil (tanpa mengeluarkan dana yang besar)?

Implikasi dari kedua bentuk penilaian ini dapat diilustrasikan dengan istilah pengambilan kebijakan sebagai bagian dari proses ekspansi tahap awal (*Uphof* dan *Ilchman*). Kebijakan pemerintah dalam pendidikan dasar secara keseluruhan, berpotensi untuk meningkatkan popularitas dari rezim yang

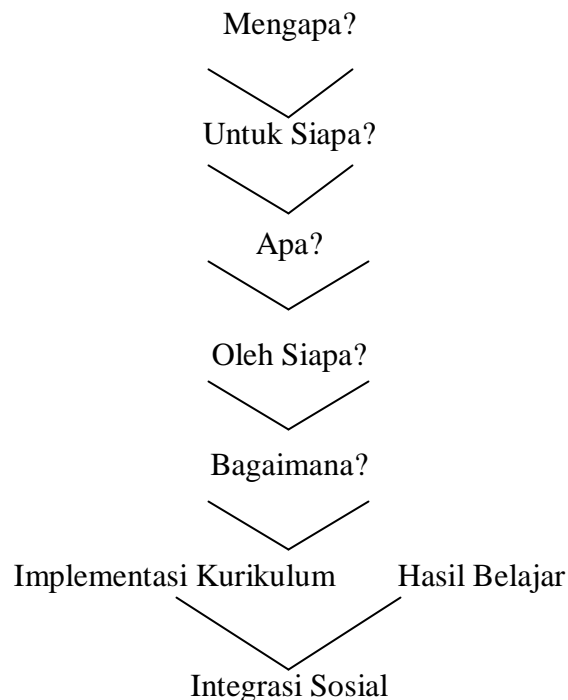
berkuasa, serta untuk meningkatkan produktivitas kaum buruh. Namun, konteks nasional akan mempengaruhi sifat dasar dari berbagai kepentingan dalam bidang politik dan ekonomi. Perkembangan yang pesat dari pendidikan dasar yang berlangsung dengan anggaran dana dari pemerintah yang sangat terbatas, dapat meningkatkan popularitas penguasa (rezim), setidaknya untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga, perkembangan yang terlalu pesat dapat mengakibatkan rendahnya kualitas dari pendidikan dasar, yang ditandai dengan adanya sedikit kemerosotan perekonomian. Memperlambat laju perkembangan pendidikan dasar dapat meningkatkan keuntungan dalam bidang ekonomi, namun mengurangi berbagai keuntungan dalam bidang politik. Dengan kerangka kerja dua dimensi ini, analisis kebijakan pada prinsipnya dirancang untuk mengevaluasi berbagai konsekuensi dalam bidang politik dan ekonomi dari berbagai strategi ekspansi (perkembangan).

Mayoritas dari analisis kebijakan pendidikan yang telah dilakukan, terbentur oleh persoalan anggaran dan selalu dikaitkan dengan berbagai pertimbangan ekonomi. Sebuah kerangka kerja dengan cakupan yang luas sangatlah diperlukan, terutama dalam melakukan penilaian terhadap pendidikan nilai, seperti yang kita temukan pada sebagian besar contoh kasus bahwa tujuan utama dari kebijakan adalah untuk mempengaruhi tatanan sosial dan politik. Tidak ada satu pun dari contoh kasus yang ada, menyatakan secara eksplisit mengenai biaya/*cost* dari kebijakan yang dirancang, hanya pada kasus yang terjadi di Malaysia dan Korea saja, di mana terdapat harapan eksplisit bahwa kebijakan yang diambil akan mampu meningkatkan performa perekonomian.

Akan tetapi, tugas dalam mengevaluasi konsekuensi politik bersifat lebih ambigu (bermakna dua) dibandingkan dalam mengevaluasi konsekuensi ekonomi. Berbagai contoh dari ekspansi yang telah saya rangkum, mengasumsikan sebuah pemerintahan monolitik yang mencari dukungan dari masyarakat yang terpisah-pisah (terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil); namun biasanya baik pemerintah maupun rakyatnya tidak sesederhana itu, sehingga sangatlah sulit untuk menciptakan sebuah barometer tunggal dari konsekuensi politik. Kebijakan pada dasarnya merupakan hasil kompromi dari berbagai biro dan konstituensi (*bureau* dan *constituencies*). Masing-masing mungkin memiliki tujuan sendiri

dalam mendukung sebuah kebijakan. Sehingga, pada saat salah satu biro memperoleh keberhasilan akibat sebuah kebijakan, maka mungkin biro lainnya mengalami kekalahan. Dan apa yang menguntungkan bagi sebuah konstituensi, mungkin merugikan bagi konstituensi lainnya.

Berbagai contoh kasus yang telah kami bahas mengindikasikan adanya keragaman dalam tujuan politik. Pada beberapa kasus, hasil belajar yang sesungguhnya tampaknya menjadi tujuan dari politik. Pada kasus yang terjadi di Amerika, yang menjadi tujuan dari politiknya adalah peningkatan pemahaman umum mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang akan memberikan kontribusi kepada kematangan dari proses politik, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Hal yang serupa juga terjadi di Jepang, tujuan dari politiknya adalah untuk memperkuat karakter dari generasi muda, sehingga mereka akan mampu mengatasi berbagai kontradiksi dan godaan dari perubahan dunia yang sangat cepat. Pada kasus-kasus ini, hasil belajar merupakan kriteria utama dari keberhasilan sebuah kebijakan, integrasi sosial dan menurunnya kenakalan remaja lebih merupakan kriteria tambahan (*distal criterion*), seperti yang terdapat pada contoh kasus di Jepang dan Eropa Barat.



Gambar 10.1. Model Analisis Berbagai Opsi Kebijakan

Pada kasus-kasus lainnya, diskusi mengenai pendidikan moral tampaknya mewakili sebuah pertentangan yang lebih mendasar di antara kelompok etnik dan kelompok politik yang saling bersaing. Di Malaysia, pemberlakuan kurikulum pendidikan moral bagi warga asing merupakan sebuah strategi guna mengurangi tekanan-tekanan dari kelompok muslim garis keras (ekstremis), yang mungkin menuntut diberlakukannya pendidikan Islam bagi seluruh orang yang bermukim di negara yang baru-baru saja menjadikan Islam sebagai landasan hukumnya. Hal yang sama juga terjadi di Singapura, di mana perkembangan dari ajaran Konfusianisme merupakan sebuah simbol dari identitas bangsa Cina. Pada kasus-kasus ini, kesuksesan direalisasikan hanya dengan “menaklukkan” pihak oposisi agar dapat mengimplementasikan kurikulum yang baru.

Dikarenakan kompleksnya tujuan dari pendidikan nilai, kami menyusun sebuah model analisis yang mencantumkan implementasi kurikulum dan hasil belajar, yang disebut juga sebagai perubahan sosial sebagai kriteria tambahan dari evaluasi, seperti yang diilustrasikan pada gambar 10.1.

Mengapa Pendidikan Nilai?

Sebagi permulaan, sangatlah tepat untuk menyatakan secara tegas bahwa: perbedaan dalam konteks nasional dari masing-masing negara akan sangat mempengaruhi pendekatan yang dipakai dalam pendidikan nilai di negara tersebut.

Asia dan Barat

Perbandingan utama dalam buku ini adalah antara negara-negara Asia, yang secara tegas menunjukkan peran negara yang positif dalam pendidikan nilai, dan negara-negara Barat yang lebih tertutup (*reserved*). Baik di Asia, maupun di Eropa terdapat beragam variasi dalam praktek nasionalnya. Kasus yang terjadi di negara-negara Barat adalah bahwa struktur politik yang berlaku pada masa kini baru mulai diterapkan sekitar akhir abad 18 dan pertengahan abad 19. Selama masa pembentukan negara modern ini, muncul beberapa kesamaan tema dalam kebijakan pendidikan. Mungkin yang paling berpengaruh adalah pencerahan dari sikap skeptis, yakni dengan berlakunya otoritas / wewenang keagamaan dan perumusan lainnya yang berhubungan dengan pemisahan gereja dari negara.

Implikasi dari pemberian peran utama / yang menonjol kepada gereja-gereja Barat dalam menetapkan standar moral adalah bahwa negara hanya memiliki peran yang terbatas dalam memantau atau membentuk moral kehidupan bangsa. Hingga pada masa kini, walaupun sekolah-sekolah publik semakin menjamur, negara-negara Barat tampak lebih berhati-hati terhadap moralitas umum (standar moralitas yang diakui bersama). Seiring dengan pengendalian yang berpegang pada standar moral, negara-negara Barat juga bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada warga negaranya bagaimana sebuah pemerintahan demokrasi itu berfungsi, serta menumbuhkan komitmen pada diri warga negaranya untuk berpartisipasi di dalam proses tersebut. Karenanya di beberapa negara Barat, pendidikan kewarganegaraan mulai mendapatkan perhatian. *John Meyer* dan rekan-rekannya, pada bab awal, mengingatkan kita bahwa di Amerika Serikat sedang berkembang sebuah tren perampangan pengajaran nilai di sekolah-sekolah, karenanya contoh kasus mengenai negara tersebut (Amerika) sebaiknya dijadikan sebagai sebuah pengecualian, bukan sebagai sebuah contoh.

Negara-negara Asia modern, Jepang sebagai pelopor, mampu bangkit dalam kekuasaan Imperium Barat, serta merasa benar-benar terancam oleh pihak Barat. Jepang, negara Asia pertama, menyatakan kekhawatirannya secara eksplisit melalui slogan-slogan pada awal perkembangan negara tersebut, “ilmu pengetahuan Barat namun moralitas Timur”. Tak lama setelah periode singkat dari eksperimen yang dilakukan oleh Jepang dengan institusi-institusi Barat, Jepang mulai mengembangkan sebuah identitas nasional yang khas, yang merupakan kombinasi dari hal-hal positif dari kedua negara (Jepang dan negara-negara Barat). Hal yang paling khusus dari model pengajaran di Jepang adalah diberikannya kepercayaan kepada sekolah-sekolah untuk mengajarkan loyalitas kepada negara, bersama-sama dengan kode perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Korea, Cina dan Taiwan, serta negara-negara Asia lainnya yang dibahas dalam buku ini, memiliki kesamaan dengan Jepang, yakni menugaskan kepada sekolah untuk menanamkan kode moral dan loyalitas kepada negara.

Homogenitas versus Masyarakat Majemuk

Perbedaan dalam letak geografis dan perkembangan sejarah, mengakibatkan kompleksitas dalam kebudayaan masyarakat. Dikarenakan dorongan dari modernisasi, masyarakat Jepang terbagi-bagi secara politik, namun tetap memegang teguh kesamaan dalam tradisi dan bahasa. Sebaliknya, masyarakat Asia lainnya yang dibahas dalam penelitian ini, memiliki tingkat kompleksitas budaya yang sangat beragam. Malaysia dan Singapura terdiri dari bangsa Melayu, Cina dan sub kelompok dari bangsa Tamil, dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi (bahasa pergaulan). Di Indonesia, pada awal kemerdekaan, sedikitnya terdapat tiga bahasa utama dan 300 dialek yang digunakan oleh berbagai suku. Di Barat, Amerika merupakan negara dengan penduduk imigran yang berasal dari berbagai penjuru dunia sehingga mungkin merupakan negara yang paling kompleks, namun dalam hal ini negara-negara Barat lainnya juga hampir menyamai Amerika. Semakin kompleks sebuah bangsa, maka akan semakin sulit dalam mengembangkan sebuah program pendidikan nilai yang dapat diterima oleh atau sesuai dengan seluruh anggota / kelompok masyarakat.

Agama sebagai sesuatu yang dapat atau tidak dapat dipungkiri

Standar moral dan konsep dari tujuan nasional sebuah negara, berhubungan erat dengan pengajaran dari agama-agama mayoritas, dan pada saat agama-agama tersebut mendapatkan dukungan institusional di pemerintahan, maka pendidikan nilai yang diselenggarakan oleh negara akan menjadi bagian dari dimensi keagamaan. Republik Amerika sangatlah unik dalam penyangkalannya terhadap peran publik dalam pendidikan keagamaan, hal ini dikarenakan negara tersebut memberikan kebebasan “praktek keagamaan” kepada sekte-sekte keagamaan yang ada di Eropa. Sebaliknya, beberapa negara Eropa berkiblat pada ajaran gereja tertentu, dan pada umumnya para pengambil kebijakan cenderung untuk memasukan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari portofolio pendidikan nilai yang disponsori oleh publik.

Jepang modern, di masa restorasi Meiji, mengalami konflik yang hebat antara berbagai kelompok keagamaan yang saling bersaing, namun pada saat

restorasi dari keturunan Dewa Matahari menjadi tema utama dari kekuasaan pemerintahan yang baru, maka Shinto pun menjadi agama negara. Hingga Perang Dunia II, ajaran Shinto sangatlah berperan dalam pendidikan nilai, dan bahkan hingga berakhirnya Perang Dunia II, yakni pada saat Amerika memaksakan sebuah konstitusi perdamaian dengan menekankan pemisahan antara agama dan negara, tema-tema keagamaan tetap terkandung dalam berbagai program pendidikan resmi. Seluruh negara Asia Tenggara yang dibahas dalam buku ini mengakui pentingnya agama. Di Malaysia, pengakuan / dasar negara yang berlaku adalah Islam, namun di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya adalah umat muslim, dasar negara yang berlaku adalah kekuasaan hukum tertinggi.

Negara Lama versus Negara Baru

Pada tahap awal pembangunan sebuah negara, persoalan nilai merupakan kekhawatiran terbesar bagi para pemimpin bangsa, hal ini dikarenakan masa ini merupakan penetapan arah/tujuan masa depan (penentu keberhasilan sebuah bangsa di masa yang akan datang). Kekhawatiran yang mereka alami, mendapatkan status formal, yakni dengan dituangkannya dalam dokumen-dokumen penting, seperti dalam konstitusi, undang-undang pendidikan, serta berbagai prinsip dari pemerintahan nasional. Sebagai cerminan dari landasan nasional, pendidikan nilai secara jelas terdapat dalam berbagai bidang, termasuk di sekolah-sekolah, media masa, organisasi kemasyarakatan, serta peristiwa umum lainnya (*public events*). Lambat laun semangat ini tampaknya padam, yakni pada saat perbedaan-perbedaan sektoral semakin mengecil dan tradisi kembali mengakar. Secara berkala, negara-negara yang lebih tua akan mengalami kebangkitan di bidang pendidikan nilai, dan banyaknya kasus dislokasi yang terjadi dapat mengakibatkan sebuah reformasi mendasar mengenai tujuan dari pendidikan nilai.

Peningkatan dan Kemerostan Ekonomi

Faktor lain yang tampaknya turut mempengaruhi minat publik dalam pendidikan nilai adalah kesejahteraan umum di sebuah negara, baik pada masa sebelumnya, maupun perbandingannya dengan negara lainnya. Bangsa-bangsa

yang dianggap berhasil biasanya mengekspresikan keyakinan yang mereka miliki terhadap sistem nilai dan juga terhadap kontribusi dari anggota masyarakatnya. Sebaliknya, pada saat suatu bangsa mengalami masa-masa sulit, maka bangsa tersebut akan mulai mempertanyakan nilai-nilai yang mereka anut dan / atau kepopuleran yang mereka capai pada saat diterapkannya standar nilai yang pernah membawa bangsa tersebut mencapai kemuliaan (*glory*). *Judith Torney-Purta* dan *Carole Hahn* dalam penelitian mereka mengenai bangsa-bangsa Eropa Barat, menunjukkan bahwa kepedulian/kebutuhan untuk merevitalisasi kehidupan perekonomian telah menjadi sebuah pendorong utama di balik kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dalam bidang pendidikan nilai.

Pemerintahan Demokratis dan Otoriter

Terlepas dari sifat dasar sebuah rezim, tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan nilai pada awalnya diadakan dengan tujuan untuk menciptakan batasan-batasan tertentu mengenai cara warga negara dalam mengevaluasi persoalan-persoalan, serta batasan mengenai tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimana pun juga, pemerintah memiliki perbedaan dalam tingkatan serta dalam bentuk pengendalian yang mereka coba terapkan. Rezim yang bersifat otoriter tampaknya lebih tertarik untuk menerapkan pengendalian yang bersifat meluas (dalam berbagai bidang). Sehingga rezim yang otoriter akan menerapkan sebuah model konformis (model yang sama) dalam pendidikan nilai yang diselenggarakan di negara tersebut. Dari berbagai contoh kasus yang terdapat di dalam buku ini, Korea dan Cina merupakan contoh yang paling baik dalam menggambarkan monopoli negara terhadap “berbagai saluran” pendidikan guna menciptakan sebuah konformitas (kesamaan), khususnya mengenai loyalitas terhadap negara. Sebaliknya, dalam masyarakat yang demokratis, terdapat sebuah bias / ketimpangan mengenai usaha untuk membekali setiap individu (warga negara) dengan kemampuan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan nilai, serta membuat pilihan yang bijak dari serangkaian kemungkinan nilai.

Apa yang Seharusnya Menjadi Bidang dan Isi dari Pendidikan Nilai?

Konteks nasional yang telah kita bahas, menunjukkan adanya alasan-alasan tertentu yang menentukan tujuan / arah dari pendidikan nilai. Tujuan-tujuan ini sering kali ditegaskan dalam undang-undang nasional dan undang-undang pendidikan, sehingga membatasi ruang lingkup dan muatan dari pendidikan nilai.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup berhubungan dengan serangkaian bidang nilai yang juga termasuk ke dalam tujuan dari kebijakan pendidikan. Beberapa pemerintahan hanya menekankan pada satu bidang saja, sedangkan pemerintahan yang lain menekankan pada beberapa bidang. Studi kasus yang diselenggarakan, mengidentifikasi beberapa kelompok besar dari nilai-nilai: nilai-nilai moral termasuk juga nilai keluarga dan sosial (masyarakat), nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kerja, nilai-nilai kewarganegaraan, dan bagi rezim yang lebih otoriter terdapat juga sebuah varian yang sangat tepat disebut dengan “komitmen” terhadap identitas nasional. Tabel 10.1 mengindikasikan berbagai kombinasi tertentu yang diterapkan pada saat ini oleh para pembuat kebijakan di negara-negara yang diteliti dalam buku ini.

Tabel 10.1. Ruang Lingkup dari Berbagai Program Pendidikan Nilai

Negara	Area Nilai				
	Moral	Agama	Kerja	Kewarganegaraan	Kebangsaan
Amerika				x	
Inggris	x	x		x	
Jerman Barat	x			x	
Jepang	x		x	x	
Singapura	x			x	x
Malaysia	x	x	x		x
Indonesia	x	x			x
Korea	x		x		x
Taiwan	x				x
Cina	x		x		x

Negara-negara Barat pada umumnya hanya menekankan pada nilai-nilai kewarganegaraan. Di Amerika Serikat, undang-undang mengenai pemisahan antara gereja dan negara merupakan refleksi dari alasan-alasan sentimentil di

masa lalu yang menganggap bahwa pendidikan moral merupakan tanggung jawab dari keluarga dan gereja. Alasan-alasan sentimental yang sama juga terdapat di negara-negara Eropa Barat; meskipun begitu, di kebanyakan negara-negara Eropa, institusi-institusi pendidikan juga memberikan perhatian terhadap nilai-nilai moral dan / atau nilai-nilai keagamaan.

Berlawanan dengan ruang lingkup yang sempit dari program pendidikan nilai di negara-negara Barat, tradisi Konfusianisme di Asia timur memberikan legitimasi yang nyata bagi sekolah untuk berperan dalam setiap lingkup / bidang dari pendidikan nilai. Di awal kebangkitan nasionalisme Jepang, ambisi negara tersebut dalam pendidikan nilai sangatlah luas, namun kembali memadam dikarenakan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Mayoritas dari negara-negara Asia yang lebih muda, notabene Korea, Cina daratan dan Indonesia, seperti juga negara-negara berkembang di kawasan lainnya, menjadikan institusi pendidikan / sekolah sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai aturan nilai yang sangat luas cakupannya. Ambisi ini merupakan refleksi dari kekhawatiran para pemimpin bangsa dalam menciptakan integrasi bangsa dengan kesamaan dalam serangkaian nilai, serta kemampuan dari para pemimpin bangsa untuk menahan berbagai oposisi yang signifikan terhadap definisi mereka akan nilai-nilai nasional / bangsa. Malaysia, dengan berada di bawah pengaruh Inggris, pada awalnya tidak mencoba untuk mengendalikan pendidikan nilai, namun di beberapa tahun belakangan ini ambisi negara dalam hal ini semakin meningkat.

Masyarakat yang disebut sebagai golongan otoriter cenderung untuk menetapkan ruang lingkup nilai yang lebih luas, dibanding ruang lingkup nilai pada masyarakat yang demokratis. Negara-negara sosialis pada umumnya menekankan pada nilai-nilai kerja, dan penekanan ini juga telah diikuti oleh negara-negara lainnya, dan sering kali diakibatkan oleh bujukan politik oposisi. Sebagai contoh, martabat kaum buruh dan cara kerja yang sungguh-sungguh, sangatlah diperhatikan di dalam kurikulum pendidikan nilai di Korea dan Jepang. Dan baru-baru ini Malaysia terlibat dalam sebuah kampanye nilai yang bertema "Look East" (Tampil secara Ketimuran), yang tujuan utamanya adalah pembelajaran tentang etos kerja bangsa Jepang dan Korea.

Implikasi

Semakin komprehensif / luas kebijakan di suatu negara dalam hal ruang lingkup dari pendidikan nilai, maka semakin banyak sumber yang diperlukan guna merealisasikan tujuan dari pendidikan nilai tersebut. Sehingga, semakin luas ruang lingkup dari pendidikan nilai, maka semakin besar juga implikasi politik yang ditimbulkan, baik dalam menghadapi kelompok-kelompok oposisi, maupun dalam mengubah pendidikan nilai yang ada agar sesuai dengan interpretasi pemerintah akan nilai-nilai yang dianggap benar.

Muatan

Para pembuat kebijakan menyerahkan tugas pengembangan muatan dari sebagian besar program-program pendidikan kepada para ahli teknik/teknisi, hal ini dikarenakan mereka menganggap pendidikan nilai sebagai sesuatu yang lebih menarik. Pada seluruh contoh kasus yang terdapat di dalam buku ini, para pemimpin politik senior selalu terlibat dalam perumusan kurikulum pendidikan nilai yang baru. Sebagai contoh, di Singapura, Deputi Perdana Menteri menyusun draf mengenai berbagai program dari pendidikan moral, dan di Amerika Serikat, Sekretaris Pendidikan memiliki wewenang untuk mengadakan perbaikan kurikulum pendidikan nilai di sekolah-sekolah publik. Para politikus ternama juga turut terlibat di dalamnya, hal ini dikarenakan mereka mampu mengenali muatan-muatan lain di luar pengetahuan yang dianggap sebagai sesuatu yang baik, benar dan indah, selain itu para politikus juga ikut terlibat dikarenakan dalam hal ini (menyangkut muatan) ditemukan banyak sekali perbedaan. Para pembuat kebijakan sangatlah memperhatikan agar penilaian-penilaian yang terdapat di dalam kurikulum dapat ditampilkan secara akurat dan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya, atau setidaknya tidak menimbulkan reaksi yang menentang dari pihak oposisi.

Kepedulian akan muatan tampaknya berhubungan erat dengan definisi dari identitas nasional. Di dalam sebuah bangsa yang relatif homogen, tugas untuk mendefinisikan identitas tersebut disederhanakan. Simbol-simbol dan peristiwa yang bersifat umum menjadi bahan baku dalam menyusun sebuah kurikulum.

Bangsa dengan perbedaan budaya memiliki pilihan antara menekankan persamaan yang mereka miliki, atau menekankan perbedaan yang ada. Konsep persamaan akan lebih mudah diterapkan jika kelompok yang beragam tersebut pernah terlibat di dalam sebuah perjuangan bersama, seperti dalam perang merebut kemerdekaan, ataupun perang melawan agresi asing, seperti yang terjadi di Amerika pada masa sebelum kemerdekaan atau di Indonesia. Namun simbol revolusi ini memiliki batasan (akan berakhir) pada saat rezim / kekuasaan baru menggantikan rezim lama: Orde baru dari pemerintahan Suharto selama lima belas tahun pertama telah menggantikan pengakuan di masa pemerintahan Sukarno. Jika tokoh / pahlawan nasional terlalu kontroversial (atau langka), terkadang memungkinkan untuk menggunakan tokoh hebat yang berasal dari negara lain: *Abraham Lincoln* dan *Martin Luther King*, meskipun keduanya merupakan warga negara Amerika, namun dikenal secara universal sebagai seorang pejuang penentang perbudakan dan diskriminasi, atau pun *Albert Schweitzer* yang berjuang melawan penyakit dan kemiskinan. Simbol politik dan kebudayaan yang berlaku sebelum masa revolusi juga dapat disorot, selama bukan merupakan sesuatu yang identik dengan sub kelompok tertentu. Jika tidak terdapat simbol politik dan kebudayaan, maka dapat juga digantikan oleh keajaiban – keajaiban alam yang berlaku secara umum (dikenal luas), seperti gunung Fuji dan Merapi, Bengawan Solo dan sungai Mississippi.

Negara-negara seperti Amerika dan India memilih untuk mengambil jalan tengah dari persamaan dan perbedaan. Negara-negara ini mengizinkan penyelenggaraan pendidikan baik yang bersifat multilingual maupun multikultural. Jika kelompok budaya yang berbeda terpisah secara geografis, maka penerapan kebijakan cenderung akan efisien. Namun seperti yang terjadi di Amerika, di mana kelompok-kelompok yang berbeda relatif berintegrasi dengan baik, namun pengimplementasian kebijakan pun terbukti cukup mahal.

Malaysia dan Belanda merupakan contoh dari negara yang menekankan perbedaan dibanding persamaan. Di Malaysia, pada masa *Hena Mukherjee*, program-program pendidikan nilai dirancang bagi bangsa Melayu dan non Melayu, dahulu berupa studi Islam dan kini berubah menjadi pendidikan moral, dahulu menjadi subjek dari hukum Islam dan kini menjadi hukum ekonomi. Dan

di Belanda berlaku kebijakan pilarisasi yang memisahkan sekolah bagi komunitas Katolik dan Protestan.

Persoalan lainnya yang menyangkut muatan adalah mengani sejauh mana nilai-nilai yang bertentangan dapat diperkenalkan. Sebagai contoh, persoalan utama yang terjadi di Amerika adalah banyaknya informasi yang harus diberikan dalam pendidikan kewarganegaraan mengenai berbagai bentuk pemerintahan serta kebudayaan-kebudayaan yang ada, dan apakah muatan ini harus disiapkan seperti menampilkan sebuah sistem yang asing / baru yang meliputi sisi positif dan negatifnya. Hal serupa juga terjadi pada pendidikan keagamaan, yakni mengajarkan / berpegangan pada ajaran satu agama saja, atau berupa perbandingan dari agama-agama yang ada.

Implikasi

Semakin kompleks konteks, maka semakin besar pula biaya yang diperlukan dalam mengembangkan kurikulum, dan semakin bertambah pula kesulitan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut.

Untuk Siapa?

Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dua pilihan utama dari kelompok yang menjadi target: kepada kelompok sosial manakah dan pada kelompok usia berapakah program pendidikan nilai ditujukan? Pertanyaan pertama akan menjawab tujuan dari program yang dibuat, sedangkan pertanyaan yang kedua akan menjawab muatan yang diperlukan dalam program tersebut.

Mayoritas dari program pendidikan nilai yang diselenggarakan oleh negara bertujuan untuk menyampaikan pesan yang sama kepada seluruh kelompok sosial. Usaha untuk memperoleh dampak yang meluas, pada dasarnya merupakan sebuah rencana yang mahal jika diterapkan sebagai sebuah aktivitas yang independen. Di masa perubahan revolusi seperti di tahun-tahun awal kekuasaan rezim Sandinista pada revolusi Kuba, sangat memungkinkan untuk merealisasikan antusiasme revolusi dengan merekrut sukarelawan untuk terlibat dalam program pendidikan: dalam hal ini, kampanye pemberantasan buta huruf yang bermuatan politis dapat diluncurkan (Arnove, 1981). Namun pada kenyataannya, sangatlah sulit untuk

merekrut sukarelawan dalam jumlah banyak guna terlibat dalam program pendidikan; sehingga lebih memungkinkan jika program-program ini diintegrasikan ke dalam institusi-institusi konvensional (institusi yang ada).

Pada tahap awal dari revolusi industri, sangatlah tidak lazim bagi pemerintah untuk mempromosikan program pendidikan nilai guna mengangkat tingkat moral dari kelompok / kelas pekerja (buruh). Sehingga di beberapa negara kontemporer, program-program ini diarahkan kepada sub kelompok tertentu, baik dengan tujuan untuk mengasimilasi sub kelompok ini ke dalam komunitas masyarakat yang lebih besar, maupun demi tujuan utamanya yakni menjaga agar sub kelompok ini tetap berada di bawah kelompok-kelompok yang dominan. Sebagai contoh dari kasus di atas adalah sekolah-sekolah di Malaysia yang berbasis pendidikan moral, di mana program pendidikan moral dirancang bagi kelompok minoritas tertentu. Program yang dirancang untuk kelompok tertentu akan dapat diterapkan secara lebih mudah jika kelompok-kelompok tersebut terpisah secara geografis.

Hal lain yang agak berbeda dari keputusan mengenai kelompok target adalah tingkatan usia tertentu di dalam kelompok yang perlu mendapatkan perhatian utama. Pada umumnya, program-program yang berhubungan dengan pendidikan moral sangatlah baik jika diterapkan pada usia dini (*Maccoby, 1968*). Program-program pendidikan nilai di negara Jepang, Malaysia dan Indonesia diberikan pada tahun pertama di tingkat pendidikan dasar (mulai kelas satu SD). Sebaliknya, program-program yang membahas mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dan / atau mengenai identitas nasional, baru diberikan pada awal usia dewasa atau bahkan nanti, hingga pada tahapan di mana generasi muda tidak memiliki landasan yang cukup dalam hal pengalaman dan latar belakang intelektual untuk mampu mencerna muatan dari program-program tersebut. Pengecualian dari penggeneralisasian ini sudah dibahas sebelumnya. Kampanye pemberantasan buta huruf di masa kekuasaan Sandinista sangat berhasil diterapkan di kalangan anak-anak, selain itu dilaporkan pula bahwa revolusi dari rezim Khomeini menitikberatkan perhatiannya pada pendidikan politik bagi anak-anak sekolah dasar dalam mengantisipasi peran anak-anak tersebut di masa yang akan datang di angkatan bersenjata maupun dalam peran-peran lainnya.

Dikarenakan muatan menjadi pertimbangan utama di dalam memilih kelompok usia sebagai target penerapan program, maka ketersediaan fasilitas perlu juga untuk dipertimbangkan. Sekolah-sekolah publik merupakan satu dari beberapa institusi yang dapat “menampung” berbagai golongan masyarakat di bawah kendali pemerintah. Dikarenakan sekolah-sekolah publik melayani “anak-anak”, maka pendidikan nilai sering kali ditujukan kepada mereka, meskipun para pembuat kebijakan meyakini bahwa orang dewasa mungkin merupakan kelompok target yang lebih tepat bagi program pendidikan nilai tersebut.

Siswa versus Guru

Dikarenakan tahapan awal kebijakan pendidikan nilai berfokus pada murid, maka pada saat garis besar dari program yang akan diselenggarakan sudah dirancang, penting kiranya untung mengidentifikasi dan juga melatih para guru. Di beberapa negara, pelatihan guru mendapatkan prioritas utama, hal ini dikarenakan kenyataan bahwa cara mengajar / proses mengajar yang kurang baik akan menimbulkan dampak yang dapat merusak program. Masa pemerintahan Meiji di Jepang merupakan contoh dari sebuah program yang sangat mementingkan pelatihan guru; pendidikan gratis memungkinkan untuk merekrut kalangan yang pada umumnya berasal dari daerah pedesaan, sekolah-sekolah khusus yang bersifat *full-time* yang dilengkapi dengan asrama didirikan di daerah pedesaan yang terisolasi, para mantan / pensiunan perwira direkrut untuk melatih dan memberikan instruksi yang bersifat dogmatis mengenai nilai-nilai nasional serta moralitas kepada para sukarelawan (*Passin*, 1965, p.91ff.). Setelah jumlah guru yang telah mengikuti program ini dianggap cukup, maka pemerintah mulai melaksanakan program pendidikan moral di sekolah-sekolah.

Hasil Akhir: Tuntutan Ekonomi atau Politik

Hasil pengamatan di atas mengasumsikan bahwa hasil akhir (*outcome*) dari pendidikan merupakan tujuan utama dari berbagai program pendidikan, namun pada beberapa kasus tampaknya hasil akhir tidak begitu diutamakan. Sebagai contoh, di Malaysia, Singapura dan Indonesia, tujuan utama dari pemerintah negara-negara tersebut adalah untuk mendapatkan penerimaan dari

berbagai pihak (dari masyarakat luas) akan interpretasi mereka mengenai identitas nasional, dan “arena” pendidikan dipilih sebagai sarana yang tepat untuk merealisasikan tujuan tersebut. Dalam kasus ini, pihak yang berwenang (pemerintah) tampaknya tidak begitu memperhatikan pemilihan kelompok usia yang optimal/tepat.

Implikasi

Secara jelas tampak adanya berbagai variasi dalam kelompok target dari pendidikan nilai. Semakin banyak kelompok yang menjadi target pendidikan nilai, maka semakin besar biaya yang diperlukan serta semakin sulit pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya, pada saat sebuah program telah berhasil mendapatkan penerimaan, maka program tersebut mendapatkan keuntungan baik dalam hal kekonsistenan maupun dalam hal skala. Nilai-nilai yang dipelajari pada situasi tertentu, diperkuat oleh nilai-nilai yang dipelajari pada situasi yang lainnya. Seseorang yang pada sebuah situasi menjadi seorang guru, dapat menjadi seorang konsultan pada situasi lainnya.

Oleh Siapa?

Sejauh ini tidak ada referensi mengenai agen-agen tertentu yang dianggap paling tepat dalam melaksanakan pendidikan nilai. Sekolah publik merupakan salah satu di antaranya, namun masih terdapat juga agen-agen lainnya.

Sebuah perbedaan umum dapat dibuat di antara sektor publik, yakni agen yang bergerak di bawah pengawasan pemerintah, serta sektor swasta, yakni agen yang otonom secara hukum dan finansial serta merupakan subjek dari hukum dan opini publik. Perbedaan yang kedua berkenaan dengan kelompok dan / atau organisasi yang dipercaya untuk mengajarkan pendidikan nilai. Negara-negara modern menganggap sekolah, organisasi-organisasi sukarelawan, organisasi-organisasi kerja, serta media masa sebagai agen-agen tambahan dalam yang menyelenggarakan pendidikan nilai. Tabel 10.2 mengilustrasikan kemungkinan kombinasi dari agen-agen yang tersedia dalam penyelenggaraan pendidikan nilai.

Tabel 10.2. Agen-Agen Pendidikan Nilai

Agen-Agen	Sektor	
	Swasta	Publik
Keluarga	xx	---
Sekolah Dasar	---	xx
Sekolah Menengah dan Universitas	xx	xx
Organisasi Pemuda	x	x
Pendidikan Militer	---	x
Institusi Dewasa (<i>Adult Institution</i>)	x	x
Kampanye dan acara-acara umum	---	x
Media	x	x

Keterangan: xx = dianggap penting di sebagian besar negara
x = dianggap penting di beberapa negara

Sebuah program pendidikan nilai yang telah diresmikan oleh negara bisa saja diselenggarakan secara eksklusif oleh agen-agen swasta. Sebuah pemerintah bisa saja mengadakan kerja sama dengan agen-agen swasta melalui masukan-masukan (pemberian saran), melalui perumusan hukum yang memerlukan pengawasan pemerintah atas prosedur-prosedur tertentu yang dianggap diperlukan bagi program yang akan diselenggarakan, atau melalui penyediaan dana dan insentif lainnya bagi agen-agen swasta. Wewenang dalam masyarakat Barat sering kali “menarik hati” institusi-institusi swasta, bahkan dalam hal penerapan program-program pendidikan publik / umum. Sebagai contoh, institusi-institusi swasta baik di Amerika maupun di Inggris mendapatkan kontrak dari pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pelatihan kerja, yang merupakan program yang sarat dengan muatan pendidikan nilai. Dan terutama di Amerika Serikat, asosiasi swasta telah memimpin dalam mempromosikan studi global serta program-program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Amerika dalam bidang perdagangan serta mengenai persoalan-persoalan kebijakan luar negeri seperti juga mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi oleh negara dunia ke tiga.

Di samping kemampuan yang dimiliki oleh sektor-sektor tertentu, pemerintah juga memutuskan untuk menerapkan beberapa dari program pendidikan nilai melalui sektor-sektor publik. Kasus yang paling ekstrem terjadi pada kamp sosialis, hal ini terjadi karena pada umumnya sangatlah tidak lazim bagi pemerintah untuk menasionalisasikan seluruh agen-agen pendidikan kecuali

keluarga; Cina bahkan mengambil langkah dengan membentuk komunitas / lingkungan pertanian dan pabrik guna menerapkan fungsi sosialisasi dari keluarga.

Pemerintahan Jepang di masa Meiji mencoba untuk menasionalisasikan agen-agen pendidikan, namun mendapatkan perlawanan terutama dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh kalangan swasta ternama seperti *Waseda's Okuma Shigenobu* atau *Keiko's Fukuzawa Yukichi*. Meskipun pemerintah mengizinkan berdirinya institusi-institusi swasta, namun institusi tersebut diharuskan untuk memberikan pendidikan moral yang diajarkan oleh guru yang ditunjuk oleh pemerintah; selain itu, dikarenakan lulusan dari institusi swasta tidak diizinkan untuk bergerak dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat (*civil service job*), maka ketertarikan mereka akan sektor publik pun dibatasi. Pemerintah Jepang juga mengambil langkah besar dalam mengendalikan media-media lainnya. Pemerintah Jepang mempengaruhi kelompok pemuda dan masyarakat untuk mendukung mantan perwira militer untuk menjadi anggota dari dewan pemerintahan. Pemerintah Jepang juga membatasi jumlah stasiun radio dan surat kabar, serta mengendalikan muatan / isi dari media-media ini. Pemerintah pun menyensor buku-buku dan majalah-majalah asing sebelum diizinkan beredar di negaranya (di Jepang) (*Mitchell, 1983*). Berbagai pengukuran ini merupakan karakteristik dari mayoritas pemerintahan kontemporer yang memiliki ruang lingkup yang luas dalam program pendidikan nilai. Negara-negara baru di Asia bergerak secara progresif ke arah penguatan peran publik di berbagai bidang.

Implikasi

Peran publik yang luas di dalam pendidikan nilai akan menimbulkan beban biaya yang lebih besar bagi negara, namun memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar. Pada saat yang bersamaan, negara yang sebelumnya menciptakan iklim yang bersifat sangat liberal dan kemudian mencoba untuk lebih berperan, akan cenderung menghadapi perlawanan yang kuat. Hal ini terjadi di Korea, dan mungkin juga di Singapura.

Bagaimana?

Hal lainnya yang berhubungan dengan agen-agen dari pendidikan nilai adalah tujuan dan metode pengajaran. Mengenai hal ini tersedia beberapa pilihan.

Klarifikasi versus Penanaman (Inculcation)

Perbedaan pertama berhubungan dengan tujuan, yakni bahwa sekolah seharusnya berusaha untuk membantu siswa menyadari / mengenali nilai-nilai yang mereka anut (*Purpel dan Ryan, 1976*). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa seharusnya diterima dan dijadikan dasar/acuan dalam pengaplikasian, bukan harus dipertanyakan atau bahkan dianggap perlu untuk dipermak. Lawan dari pendapat ini adalah anggapan yang menyatakan bahwa nilai-nilai seharusnya diajarkan kepada siswa. Pendekatan ini berasumsi bahwa siswa belum memiliki pengetahuan mengenai berbagai pengaruh yang dianggap baik, karenanya mereka perlu diberikan pengajaran mengenai nilai-nilai yang dianggap pantas.

Pengajaran Kognitif versus Empiris

Perbedaan kedua berhubungan dengan metode/tata cara pengajaran. Beberapa ahli pendidikan nilai meyakini bahwa nilai-nilai secara esensial dapat diajarkan dengan cara yang sama seperti yang digunakan dalam mengajarkan sejarah atau pun mata pelajaran lainnya yang sejenis, yakni melalui ceramah, buku teks dan pemberian latihan. Namun ada juga yang beranggapan bahwa pendidikan nilai memerlukan pendekatan khusus yang berbasis pengalaman, di mana siswa ditempatkan ke dalam situasi kehidupan nyata dan diberikan kesempatan untuk menguji nilai-nilai yang mereka anut melalui interaksi yang mereka lakukan dengan teman sebaya, maupun dengan anggota masyarakat lainnya.

Sekolah atau nanti (di luar sekolah)

Mayoritas dari literatur / bahan bacaan mengenai pendidikan nilai menyarankan pendidikan dilakukan di lingkungan sekolah, namun pendidikan nilai juga dapat dilakukan di luar lingkungan sekolah, terutama jika pengajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan eksperimental. Pengajaran yang

dilakukan di luar sekolah sangatlah bervariasi, mulai dari lingkungan yang relatif tidak terstruktur, hingga lingkungan yang sangat terstruktur, seperti kamp militer, penjara dan rumah sakit jiwa.

Lingkungan di luar sekolah pada umumnya ditujukan bagi pengajaran / pendidikan yang bersifat eksperimental, namun hal ini juga dapat diterapkan pada kegiatan rutin sekolah, di antaranya melalui pemberian tanggung jawab sekolah yang lebih beragam kepada siswa, pengembangan karya wisata yang lain dari biasanya (spesial), serta melalui revisi yang cermat mengenai kurikulum sekolah yang bersifat “tersembunyi / implisit” guna memperkuat muatan nilai dalam pengajaran yang diberikan kepada siswa. *Tomoda* pada bab 5 menjelaskan bagaimana sekolah-sekolah dasar di Jepang memanfaatkan kelompok, baik di dalam kelas maupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai sekolah, untuk membangun nilai kerja sama dan saling menghormati; ia juga mengindikasikan bagaimana mengembangkan iklim yang keras di lingkungan sekolah menengah guna menumbuhkan nilai-nilai kerja keras dan disiplin.

Evaluasi Formal versus Informal

Banyak dari program-program pendidikan melibatkan berbagai bentuk penilaian mengenai kemajuan siswa. Dalam kasus pendidikan nilai, beberapa pendidik meyakini bahwa proses interaksi antara siswa dan guru termasuk ke dalam salah satu tipe penilaian yang dilakukan melalui konsensus kelompok atau kritik, dan mencoba menerapkan sesuatu yang bersifat lebih formal bukanlah merupakan sesuatu yang diinginkan. Mereka yang menolak bentuk evaluasi formal beralasan bahwa penggunaan tes yang bersifat formal akan dapat mengurangi pendidikan nilai, dan menjadikannya sebagai sebuah mata pelajaran yang bersifat kognitif, di mana siswa mempelajari jawaban yang dianggap tepat, namun tidak meyakinkannya. Sebaliknya, mereka yang meyakini evaluasi formal dalam pendidikan nilai, seperti juga dalam mata pelajaran lainnya, adalah orang yang dapat memberikan motivasi serta mampu menjamin pelaksanaan pengajaran yang benar/sesuai. Para pendukung evaluasi formal terkadang juga mengakui bahwa ujian hanya dapat mengukur konformitas/kesesuaian yang eksternal saja, namun pada saat siswa menjawab soal-soal ujian mengenai nilai dengan tepat,

maka terdapat kemungkinan bahwa apa yang telah ia lakukan tadi (jawaban ujiannya) akan mempengaruhi sikap dan keyakinannya. Tentu saja selain ujian masih terdapat alat ukur lainnya untuk mengukur pemerolehan nilai, seperti evaluasi/penilaian yang diberikan oleh guru maupun teman sekelas, atau catatan mengenai partisipasi siswa dalam proyek bersama.

Perdebatan mengenai penilaian terkadang tidak lebih dari sekedar penghalusan dari kekhawatiran /persoalan yang sesungguhnya, yakni mengenai kendali dari proses pembentukan nilai. Jika tidak terdapat penilaian yang bersifat formal, maka guru akan memiliki otoritas penuh untuk melakukan apapun yang ia kehendaki di dalam kelasnya. Dengan mengetahui penilaian yang berbasis kelas akan dapat memperbesar wewenang / otoritas seorang guru. Penilaian yang berbasis sosial memperkuat persoalan yang bersifat prinsipil. Penilaian eksternal memperkuat posisi negara. Di Korea dan di Cina daratan, pencantuman hasil tes nilai (pendidikan nilai) pada saat seseorang mendaftar ke jenjang perguruan tinggi, digunakan oleh negara sebagai salah satu sarana untuk menjaring orang-orang yang dipersiapkan untuk menyandang status elit di dalam masyarakat.

Implikasi

Cara/Bagaimana (*How*) dari pendidikan nilai sangatlah dipengaruhi oleh opsi-opsi lainnya. Klarifikasi nilai cenderung lebih ditekankan dalam masyarakat yang demokratis yang menganggap bahwa penduduk / warga negara mereka memiliki hak untuk menganut nilai-nilai yang mereka yakini, sementara di dalam masyarakat yang bersifat otoriter, instruksi/pengajaran nilai menjadi salah satu karakteristik mereka. Senada dengan tes yang bersifat eksternal yang juga merupakan karakteristik dari masyarakat yang bersifat otoriter. Semakin liberal sebuah pendekatan, maka tidak diragukan lagi akan dapat membantu individu untuk memiliki kendali yang lebih terhadap negara. Sebaliknya, pendekatan yang lebih direktif/diarahkan, memberikan peluang terjadinya perpecahan di dalam negara yang dapat berbentuk pengerahan masa, dan jika masyarakat bereaksi negatif terhadap program pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, maka hal tersebut merupakan sebuah indikasi dari sub-sub kelompok yang menentang pemimpin negara. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam

hal biaya yang diasosiasikan dengan opsi-opsi di atas, kecuali bahwa pendekatan liberal memerlukan adanya para instruktur dengan keahlian dan bayaran yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Jelas kiranya, bahwa para pembuat kebijakan memiliki beragam opsi yang dapat dipilih dalam mengembangkan program pendidikan di negara mereka. Tentu saja, pertanyaan pertama yang perlu ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan adalah mengenai tujuan mereka: apakah mereka hanya berusaha untuk mempublikasikan nilai-nilai yang mereka pilih di dalam program pendidikan, ataukah mereka benar-benar memiliki ketertarikan akan perbaikan proses pemikiran dan juga keyakinan dari masyarakat luas? Dan jika mereka berjuang untuk mengadakan perubahan sosial yang signifikan, maka apakah mereka benar-benar peduli untuk mengasah intelektualitas dan keahlian publik dalam mengevaluasi ataukah lebih berusaha untuk menanamkan nilai-nilai umum dalam hal tertentu. Kepedulian ini, beserta ruang lingkup dari nilai yang ditargetkan akan mempengaruhi tingkat dari komitmen publik dalam hal kekuasaan, dana serta pengawasan dan monitoring. Pada saat perbincangan mengenai pendidikan nilai merambah dari aktivitas-aktivitas di lingkungan sekolah menjadi serangkaian kegiatan yang dikendalikan oleh negara, maka hal ini menunjukkan bahwa di negara tersebut terdapat beragam variasi dalam pengimplementasiannya.

Secara umum, negara-negara Asia tampaknya tidak terlalu terkekang oleh hukum dan adat-istiadat dalam tinjauan mereka mengenai berbagai opsi kebijakan, sehingga lebih cenderung menerapkan program-program pendidikan nilai yang bersifat holistik. Sebaliknya, negara-negara Barat lebih berfokus pada ruang lingkup nilai yang lebih sempit cakupannya, serta memberikan lebih sedikit opsi untuk direalisasikan. Tujuan dari buku ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai opsi yang dapat dipilih oleh para pembuat kebijakan, dan juga memberikan gambaran kepada para pembuat kebijakan mengenai berbagai implikasi dari opsi-opsi ini. Dalam tinjauan mengenai kebangkitan minat akan pendidikan nilai, diharapkan bahwa survei ini akan dapat memberikan gambaran kepada para pemimpin pendidikan mengenai berbagai opsi yang terdapat di Asia dan di negara-negara Barat.